

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI SMP 3 SATU ATAP GEBOG KUDUS**

Oleh
Illiya Arina Riska, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia Pintar Program, hereinafter referred to as PIP, is a government cash aid granted to learners whose parents are not and / or less able to finance their education, as a continuation and expansion of the target of the Bantuan Siswa Miskin program (BSM). The method used in this research is descriptive qualitative method. The purpose of this research is to see how the implementation of Indonesia Pintar Program (PIP) in SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus and to analyze factors influencing its implementation by using Van Meter and Van Horn implementation theory. The problems of implementation of the Indonesia Pintar Program are among others, the purpose and objectives, socialization, data collection mechanism and verification, fund distribution, communication, resources, characteristics of implementing agents and social environment. The recommendation given is that the implementing agency should be more responsible for coordinating the junior high schools and the channeling banks, be able to pay attention to the human resources involved in this Smart Indonesia program to be more adequate not only the quantity but also the quality, the implementing agent must be able to be firm and strict the violations that occur, for the social environment, especially the parents of the Smart Indonesia Program beneficiaries, should be better understood and comply with the provisions and technical program of Indonesia Pintar.

Keywords : Implementation of Indonesia Pintar Program, Communications, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Social Environment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab pendidikan dijadikan suatu instrumen dalam penentuan pemberian kontribusi

terhadap kemajuan suatu bangsa. Kualitas intelektual seorang manusia dapat dilihat seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terjadi proses

transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan aspek-aspek penting lainnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah sangat serius dan tidak menyepelekan urusan penyelenggaraan pendidikan, bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang disebutkan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini, pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Pelaksanaan program

Wajib Belajar 12 tahun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010. Wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah dalam pelaksanaannya mempunyai 2 konsekuensi. Pada satu sisi, semua anak bangsa wajib bersekolah sampai batas yang ditentukan pemerintah. Sementara pada sisi lainnya, pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan semua biaya dan wajib menyediakan semua fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun terbukti dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat menjamin semua hak dan kewajiban anak untuk tetap bersekolah sampai SMA.

Tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik dirasa berat oleh orangtua siswa. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Angka

Melanjutkan Sekolah SMP di Kabupaten Kudus ada pada urutan ke 5 terendah dengan angka 66,74528 diakibatkan dari mahal nya biaya pendidikan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya bantuan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). Program Indonesia Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Dilihat dari data penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kudus pada tahun 2015-

2017 menunjukkan presentase penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi di salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Gebog menunjukkan angka yang fluktuatif. Berbeda dengan di Kecamatan Gebog yang menunjukkan angka fluktuatif, jumlah siswa penerima program Indonesia Pintar di SMP 3 Satu Atap Gebog mengalami penurunan tajam dari tahun ke tahun. Untuk itu, peneliti ingin mengambil lokus di SMP 3 N Satu Atap Gebog Kudus.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah harus mempunyai unsur-unsur yang jelas dan tepat karena akan menentukan suatu sub pokok bahasan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun perumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus?
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus
2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus

D. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Administrasi Publik

Edward H. Litchfield dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006:25) Administrasi Publik adalah

suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006:25) mendefinisikan Administrasi Publik adalah administrasi dari Negara-negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Dari pengertian Administrasi Publik diatas, didapat kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Didalam kajian teori selanjutnya, penulis akan membahas tentang Kebijakan Publik. Kebijakan publik merupakan salah satu bidang kajian yang menjadi pokok perhatian administrasi publik, karena selain menjadi penentu arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat dipergunakan untuk

menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan.

2. Kebijakan Publik

Menurut Robert Eyestone dalam (Budi Winarno, 2012: 20) bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sedangkan Thomas R. Dye dalam (Budi Winarno, 2012: 20) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu definisi kebijakan publik menurut Chief J.O (1981) dalam Abdul Wahab, 2005:5 mengatakan: “Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang Kebijakan sebagaimana dijelaskan diatas penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah yang dipilih pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan berkaitan dengan

pencapaian tujuan yang diinginkan ataupun penyelesaian masalah di suatu negara. Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn dalam (Budi Winarno 2012: 35-37) yaitu:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda
- 2) Tahap Formulasi Kebijakan
- 3) Tahap Adopsi Kebijakan
- 4) Tahap Implementasi Kebijakan
- 5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahapan-tahapan kebijakan publik yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini mengangkat pada tahapan implementasi kebijakan. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah diambil pemerintah.

3. Implementasi Kebijakan

Beberapa definisi implementasi kebijakan publik menurut Jenkins dalam Parsons, 2006:463 studi implementasi adalah studi perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Pendapat lain dari Maxmanian dan Sabatier dalam Agustino,2006:139 Implementasi kebijakan adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian benar implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

4. Program

Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum program diartikan sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari

pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi dari para ahli :

Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu : Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Merancang (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- 2) Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana

pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. (Tachjan, 2006i:35)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

5. Model-Model Implementasi Kebijakan

Beberapa model implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ahli diantaranya model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan

Implementation as A Political and Administration Process.

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1) Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu

organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif)

- d. Vitalitas suatu organisasi
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
 - f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- 4) Komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana
- Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
- Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Olehnya itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

6) Kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana/implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Melainkan kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas ke bawah” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui

(bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

E. FENOMENA PENELITIAN

Fenomena penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses implementasi Program Indonesia Pintar di SMP N 3 Satu Atap Gebog Kudus menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Indonesia Pintar.

1. Implementasi

Implementasi merupakan bentuk dari eksekusi dari Program Indonesia Pintar. Implementasi disini dapat dilihat dengan :

A. Tujuan program indonesia pintar di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Meringankan biaya personal pendidikan.

3) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

4) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

B. Sosialisasi Program Indonesia Pintar

C. Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Data

1. Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar
2. Mekanisme Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar
3. Mekanisme Penetapan Penerima Program Indonesia Pintar
4. Kendala dalam Pendataan dan Verifikasi Data

D. Mekanisme Penyaluran Dana

E. Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Dana

- a. Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar
- b. Pelanggaran dan Pemberian Sanksi dalam Program Indonesia Pintar
- c. Partisipasi dalam Pengawasan dan Pelaporan

2. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud merupakan hal yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar dengan difokuskan pada komunikasi antar aktor pelaksana.

Gejala komunikasi :

- 1) Kelancaran program transmisi, dapat diukur dengan :
 - a. Intensitas pertemuan antara aparatur pelaksana dan penerima program
 - b. Media yang digunakan dalam proses komunikasi
- 2) Kejelasan perintah implementasi program, dapat diukur dengan :
 - a. Kejelasan program
 - b. Informasi yang diterima
- 3) Konsistensi pelaksanaan kebijakan, dapat diukur dengan :
 - a. Ketepatan informasi
 - b. Tingkat sosialisasi

3. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- b. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- c. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a. Pusat perhatian agen pelaksana
- b. Karakter agen pelaksana

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Pengaruh lingkungan eksternal terhadap implementasi program

Fenomena dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

METODA PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Indonesia Pintar

1. Maksud dan Tujuan

Dilapangan sendiri pelaksana Program Indonesia Pintar dapat memahami dengan benar maksud dan tujuan Program Indonesia Pintar. Keberhasilan dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sekolah penerima Program Indonesia Pintar. Akan tetapi dilapangan juga terlihat beberapa permasalahan seperti :

1. Sebagian kecil orangtua penerima PIP merasa belum terbantu. Faktor penyebabnya

adalah lingkungan sosial, yaitu ketidakpahaman orangtua penerima Program Indonesia Pintar terhadap teknis pelaksanaan program ini .

2. Hanya sebatas pemberian bantuan biaya tanpa memperhatikan aspek lain seperti kualitas siswa. Disamping memberikan bantuan biaya, faktor kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik/guru juga perlu diperhatikan. Karena kualitas seorang siswa terbentuk dari kualitas pendidik / sumber daya manusia yang berkualitas pula. Disamping itu kualitas fasilitas pendidikan / sumber daya sarana dan prasarana yang tidak memadai juga mempengaruhi mutu pendidikan dan kualitas siswa.
3. Angka kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan di tingkat jenjang pendidikan SMP masih rendah. Faktor penyebabnya bukan hanya karena alasan permasalahan ekonomi saja, akan tetapi juga lingkungan sosial terkait minat siswa untuk melanjutkan sekolah yang rendah.

2. Sosialisasi

Kelanjutan sosialisasi Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terjadi permasalahan karena kelanjutan sosialisasi hanya disampaikan melalui aplikasi / web resmi Program Indonesia Pintar, surat pemberitahuan, media sosial dan penyebaran informasi dilakukan berjenjang.

Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi dikarenakan :

- 1) Kurangnya perhatian pelaksana sosialisasi, yang mana pelaksana kurang tanggap menjalankan perannya dalam kegiatan sosialisasi.
- 2) Informasi tidak serempak dan merata, dikarenakan penyebaran informasi tidak dilakukan secara bersamaan dan oleh sebab itu penerimaan informasi menjadi tidak serempak dan merata, dan
- 3) Koordinasi pelaksana kurang, dimana hanya pada awal

bergulirnya program ini saja diadakan pertemuan resmi untuk membahas Program Indonesia Pintar antara pelaksana yang bertanggungjawab Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan pelaksana di Sekolah. Dan untuk kelanjutannya dilakukan melalui media-media perantara tidak secara langsung.

3. Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Data

1) Mekanisme Pengusulan

Mekanisme pengusulan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kepada pihak SMP N 3 Satu Atap sudah berjalan dengan baik dan penyampiannya jelas. Akan tetapi, terjadi ketidakpahaman orangtua penerima PIP terhadap alur mekanisme pengusulan yang dirasa kurang jelas. Ketidakberhasilan pengusulan terjadi dikarenakan ketidakjelasan informasi antara sekolah / SMP N 3 Satu Atap Gebog dengan orangtua penerima Program Indonesia Pintar, sekolah tidak memberi informasi yang dibutuhkan orangtua penerima Program Indonesia Pintar terkait bagaimana alur mekanisme pengusulan Program Indonesia Pintar tersebut. Hal ini

menyebabkan kesalahpahaman orangtua penerima Program Indonesia Pintar.

2) Mekanisme untuk Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar

Ketidakberhasilan mekanisme untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dilapangan disebabkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan pihak SMP N 3 Satu Atap Gebog tidak memahami bagaimana kriteria yang ditetapkan untuk siswa mendapatkan KIP.

3) Mekanisme Penetapan Penerima

Mekanisme penetapan Program Indonesia Pintar kurang berhasil dilapangan hal tersebut disebabkan faktor kurangnya sumber daya anggaran yang menyebabkan tidak dapat terselenggaranya pertemuan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dengan sekolah untuk mempublikasikan hasil penerima Program Indonesia Pintar. Publikasi penerima Program Indonesia Pintar hanya di informasikan melalui aplikasi / web resmi, edaran pemberitahuan atau media sosial whatshapp.

4) Kendala dalam Pendataan dan Verifikasi

Kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan adalah terkadang sekolah tidak adil karena semua siswanya diusulkan tanpa melihat siswa tersebut memang berhak atau tidak. Sementara itu permasalahan di sekolah ada banyak siswa yang kurang mampu tidak masuk daftar penerima Program Indonesia Pintar.

4. Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana terdiri dari beberapa tahapan pencairan itu dalam 1 tahun tidak tentu waktunya. Jadi pencairan dananya tidak tentu 1 tahun 2x tahapan atau bahkan lebih. Penerimaannya 1 tahun 1 kali dan tahapan penerimaannya tidak bisa ditentukan karena semua tergantung pusat.

Keberhasilan dalam mekanisme penyaluran dana di SMPN 3 Satu Atap Gebog disebabkan adanya faktor pelaksana / sumber daya manusia yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu bertanggungjawab mempermudah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar dengan cara kolektif / diambil oleh sekolah secara

keseluruhan dengan persetujuan orangtua siswa penerima Program Indonesia Pintar tentunya. Pengambilan kolektif dilakukan karena jarak tempuh sekolah dengan bank yang cukup jauh dan sulit.

5. Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Dana

1) Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar

Keberhasilan dalam pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar di SMP N 3 Satu Atap Gebog dilaksanakan sesuai anjuran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dana Program Indonesia Pintar yang mengharuskan dana dibelanjakan sesuai kebutuhan siswa untuk kebutuhan sekolah. Pihak SMP N 3 Satu Atap memiliki sistem pengelolaan dana Program Indonesia Pintar yang berbeda dengan sekolah lain yaitu dengan mewajibkan siswa penerima Program Indonesia Pintar untuk menabung dana yang didapatkannya, nanti dana dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan sekolah dengan catatan tertentu.

2) Pelanggaran dan Pemberian Sanksi dalam Program Indonesia Pintar

Untuk mekanisme pelaporan dilapangan apabila terjadi pelanggaran, menurut Dinas Pemuda dan Olahraga, biasanya hanya sebatas diberi teguran setelah itu tidak ada pelanggaran lagi. Begitu juga di SMP N 3 Satu Atap Gebog tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran karena selama ini tidak ada pelanggaran dan tidak ada yang komplain. Terkait sanksi belum pernah memberikan sanksi apapun. Karena belum pernah di temukan pelanggaran dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar, sikap pelaksana dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun SMP N 3 Satu Atap tidak sepenuhnya memahami apa sanksi yang akan didapat apabila terjadi pelanggaran. Faktor penyebabnya dikarenakan sikap agen pelaksana yang pasif terhadap informasi yang belum diketahui sebelumnya.

3) Partisipasi dalam Pengawasan Program Indonesia Pintar

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilapangan sangat dirasakan karena masyarakat turut serta memberitahukan informasi apabila ada ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan sekolah terkait Program Indonesia Pintar.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

1. Komunikasi

a. Kelancaran Program Transmisi dalam Program Indonesia Pintar

Intensitas pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Sekolah jarang dilakukan secara langsung karena pemberitahuan informasi lebih sering menggunakan media penghubung melalui media sosial.

b. Kejelasan Informasi dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Kejelasan informasi yang disampaikan oleh implementor dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar dalam penelitian ini sudah berjalan dengan baik diketahui bahwa pihak Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga dalam menyampaikan informasi sudah dijelaskan sedetail-detailnya. Komunikasi atau informasi yang sekolah terima dari dinas selalu jelas dan tidak membingungkan.

c. Konsistensi Pelaksana Kebijakan Program Indonesia Pintar

Konsistensi implementor dalam mengkomunikasikan kebijakan Program Indonesia Pintar dalam penelitian ini diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga selalu konsisten terhadap apa yang sudah di perintahkan atau di informasikan. Informasi yang diberikan tidak berubah-ubah, informasinya jelas tidak membingungkan, pernyataan tersebut di akui oleh pihak SMP N 3 Satu Atap Gebog.

2. Sumberdaya

a. Sumber Daya Manusia

Terkait Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Program Indonesia Pintar, dapat disimpulkan bahwa kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga yang bertanggungjawab terhadap Program Indonesia Pintar belum cukup untuk melingkupi seluruh sekolah SMP di Kabupaten Kudus. Sedangkan di SMPN 3 Satu Atap Gebog kuantitas sumber daya manusianya telah memadai. Kriteria yang digunakan untuk menentukan SDM/Pegawai yang ikut serta dalam implementasi Program Indonesia Pintar belum ditentukan sesuai dengan keahliannya pegawai, karena dilapangan tidak diterapkan kriteria tertentu dan spesifik akan tetapi yang utama harus menguasai Informasi dan Teknologi (IT).

b. Sumber Daya Anggaran

Terkait sumber daya anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memberi anggaran untuk kegiatan operasional Program Indonesia Pintar baik di Dinas Pendidikan maupun SMP N 3 Satu Atap Gebog.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dan kelayakan sumber daya sarana dan prasarana pemanfaatannya sudah baik dan layak digunakan akan tetapi sarana dan prasarana seperti laptop dan internet disediakan oleh dinas dan sekolahan masing-masing. Tidak ada sarana dan prasarana khusus yang didapat dari Program Indonesia Pintar.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Ketegasan agen pelaksana masih terbilang belum maksimal. Agen pelaksana kurang keras dan ketat dengan pelanggaran yang ditemukannya tersebut, disamping itu sikap pasif yang ditunjukkan agen pelaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan SMP N 3 Satu Atap yang tidak memiliki inisiatif untuk mencari informasi yang belum diketahui sebelumnya.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Permasalahannya dalam lingkungan sosial terletak pada ketidakpahaman orangtua penerima Program Indonesia Pintar terkait teknis pelaksanaan program ini . Faktor

penyebabnya lain juga bukan hanya karena alasan permasalahan ekonomi saja, akan tetapi juga lingkungan sosial terkait minat siswa untuk melanjutkan sekolah yang rendah.

PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Program Indonesia Pintar sudah tersampaikan dengan baik. Akan tetapi tujuan program masih belum berjalan dengan baik. . Terjadi beberapa permasalahan seperti : Ketidapkahaman orangtua penerima Program Indonesia Pintar terhadap program dan minat siswa untuk melanjutkan sekolah yang rendah. Hanya sebatas pemberian bantuan biaya

tanpa memperhatikan aspek lain seperti kualitas siswa. Angka kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan di tingkat jenjang pendidikan SMP masih rendah.

B. Sosialisasi

Kelanjutan sosialisasi kurang berjalan dengan baik. Kelanjutan sosialisasi hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melalui aplikasi / web resmi Program Indonesia Pintar, surat pemberitahuan, media sosial dan penyebaran informasi dilakukan berjenjang.

C. Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Data

(1) Mekanisme Pengusulan

Mekanisme Pengusulan dari dinas ke sekolah sudah berjalan baik, akan tetapi dari sekolah ke orangtua penerima PIP dirasa kurang jelas. Kurang optimalnya pengusulan terjadi dikarenakan ketidakjelasan informasi antara sekolah / SMP N 3 Satu Atap Gebog dengan orangtua penerima Program Indonesia Pintar.

(2) Mekanisme untuk Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar

Kurang berjalan dengan maksimal pihak sekolah dan dinas tidak memahami kriteria siswa yang mendapatkan KIP. Sikap pelaksana yang pasif kurang adanya inisiatif mencari informasi.

(3) Mekanisme Penetapan Penerima

Tidak terselenggaranya pertemuan antara dinas dan sekolah untuk mempublikasikan secara langsung hasil Program Indonesia Pintar terlihat kurangnya sumber daya anggaran.

(4) Kendala dalam Pendataan dan Verifikasi

Masih ada siswa yang kurang mampu tidak masuk daftar penerima PIP.

D. Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana di SMP N 3 Satu Atap Gebog sudah berjalan dengan baik. Pihak sekolah bertanggungjawab mempermudah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar dengan cara kolektif.

E. Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Dana

(1) Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar

Sudah berjalan dengan baik sistem pengelolaan dana di SMP N 3 Satu

Atap Gebog Kudus. Sumber daya manusia di SMP N 3 Satu Atap Gebog kreatif dan inovatif, pihak SMP N 3 Satu Atap memiliki sistem pengelolaan dana Program Indonesia Pintar yang berbeda dengan sekolah lain yaitu dengan mewajibkan siswa penerima Program Indonesia Pintar untuk menabung dana yang didapatkannya, nanti dana dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan sekolah dengan catatan tertentu.

(2) Pelanggaran dan Pemberian Sanksi Program Indonesia Pintar

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan SMP N 3 Satu Atap sudah meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, terkait dengan sanksi karena belum pernah di temukan pelanggaran menjadikan sikap pelaksana yang tidak sepenuhnya memahami apa sanksi yang akan didapat apabila terjadi pelanggaran. Agen pelaksana pasif terhadap informasi yang belum diketahui sebelumnya.

(3) Partisipasi dalam Pengawasan Program Indonesia Pintar

Orangtua siswa dan masyarakat sudah turut serta berpartisipasi dalam pengawasan PIP.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi implementasi Program Indonesia Pintar khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP N 3 Satu Atap Gebog. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga hendaknya lebih bertanggungjawab melakukan koordinasi kepada sekolah-sekolah dan bank penyalur.
2. Bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus maupun SMP N 3 Satu Atap Gebog hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya manusia yang terlibat dalam program Indonesia Pintar ini agar lebih memadai bukan

hanya kuantitasnya akan tetapi juga kualitasnya. Jika memang belum ada fasilitas atau insentif khusus dari bergulirnya Program Indonesia Pintar ini, diharapkan pihak sekolah tetap pada motivasi yang tinggi dalam mensukseskan Program Indonesia Pintar.

3. Bagi agen pelaksana, harus dapat bersikap tegas dan ketat terhadap pelanggaran yang terjadi. Setiap sekolah harus mampu membuat peta kondisi ekonomi semua peserta didiknya, agar lebih mudah dan akurat dalam melakukan proses penyeleksian peserta didik penerima Program Indonesia Pintar, bukan dengan cara memasukkan seluruh siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar karena dirasa akan tidak adil.
4. Bagi lingkungan sosial, khususnya orangtua penerima Program Indonesia Pintar, hendaknya harus lebih memahami dan mentaati ketentuan dan teknis Program

Indonesia Pintar. Orangtua harus memiliki sikap proaktif mencari informasi terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Munadi, Muhammad., Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suryana, Siti Erna Latifi. 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Thesis Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: Melalui <http://respository.usu.ac.id/>.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: APII

_____, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Irawan, Prasetya. 2005. *Materi Pokok Penelitian*

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS

Sumber Internet :

<http://www.koranmuria.com/2016/05/20/38171/memprihatinkan-miliaran-dana-kartu-pintar-jokowi-tak-tersalurkan-di-kudus.html> (diakses 14 September 2016)

<http://www.murianews.com/2016/07/14/88218/aneh-tapi-nyata-di-kudus-ada-siswa-sudah-lulus-tapi-terima-kartu-indonesia-pintar-kip.html> (diakses 14 September 2016)

eprints.uny.ac.id/33539/1/Skripsi%20Budi%20Widodo_10501244013.pdf (diakses pada 26 Maret 2017)

<http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sosiodew/article/download/1105/pdf/74> (diakses pada 26 Maret 2017)

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/33/name/jawa-tengah/detail/3319/kudus> (diakses pada 11 Januari 2018)

<http://profil.pdkjateng.go.id/> (diakses pada tanggal 26 Maret 2018)

Dokumen-dokumen :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 Tahun 2016

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat (5)

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun

Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus
Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016

